

GELAR PESTA MIRAS DENGAN BUSANA MINIM

Petugas Gabungan Gerebek Muda-mudi Lagi Asyik di Kolam Renang Bekasi

BEKASI (IM) - Petugas gabungan menggerebek sebuah kolam renang di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penggerebekan ini dilakukan setelah adanya aduan dari masyarakat yang merasa terganggu dan tidak nyaman dengan aktivitas yang berlangsung di kolam renang tersebut.

"Itu ada musik keras, DJ. Kemudian kita melihat ada pakaian-pakaian yang minim yang kita anggap, dari kacamata kita itu berpakaian minim, juga minuman-minuman beralkohol yang beralkohol tinggi," ungkap Rohadi, Kabid Penegakan Perda Pol PP Kabupaten Bekasi, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (30/1).

Saat penggerebekan, petugas tidak menemukan adanya penggunaan narkoba pada pengelola maupun

pengunjung yang datang. Namun, petugas menyita puluhan botol minuman keras (miras) dari berbagai merek. Setelah dilakukan penggerebekan, Rohadi mengatakan bahwa petugas gabungan membubarkan pesta itu untuk menghindari efek-efek yang tidak diinginkan.

Dalam penggerebekan tersebut, kerucuan sempat terjadi karena pengelola dan pengunjung kolam renang yang tengah asyik berpesta menolak dibubarkan. Meski demikian, petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Polres tetap membubarkan acara.

Selain mendapatkan aduan dari masyarakat yang terganggu, pesta yang digelar di kolam renang tersebut juga tidak mengantongi izin keramaian. ● yan

Set Top Box Meledak, Rumah di Tanjung Priok Hangus Terbakar

JAKARTA (IM) - Bangunan rumah tinggal di Jl. Warakas I G 25 RT.009/RW 008 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, hangus akibat kebakaran yang melanda pada Minggu (29/1) malam sekitar pukul 22.36 WIB.

Dugaan sementara terjadinya peristiwa kebakaran tersebut adalah akibat korsleting listrik pada STB (set top box) hunian itu.

"Terjadi korsleting pada set top box yang merambat api pada dinding triplek kayu hingga terjadi

kebakaran 1 rumah," terang Kasieops Sudin Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Abdul Wahid dalam keterangannya, Senin (30/1).

Beruntung kata dia, tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kebakaran rumah yang ditaksir kerugiannya kisaran Rp50 juta.

Ia menyebut, kebakaran berhasil dipadamkan sekitar pukul 01.15 WIB dengan pengerahan sebanyak 9 unit kendaraan dinas Damkar berikut 45 orang personel. ● yan



AKSI TERKAIT PEMBAKARAN AL QURAN
Pengunjuk rasa melakukan aksi di Kantor Kedutaan Besar Swedia, Jakarta Selatan, Senin (30/1). Aksi tersebut untuk mengenggam pembakaran kitab suci Al Quran yang dilakukan oleh politisi asal Swedia Rasmus Paludan.

Jumlah Warga Miskin Ekstrem di DKI Melonjak

JAKARTA (IM) - Jumlah penduduk miskin ekstrem di DKI Jakarta melonjak. Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat per Maret 2022 ada sebanyak 95.668 penduduk ibu kota yang hidup di bawah kondisi miskin ekstrem.

"(Jumlah penduduk miskin ekstrem bertambah) 0,89 persen, sejumlah 95.668 jiwa," kata Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta, Suryana usai Rapat Terbatas di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/1).

Suryana menerangkan angka kemiskinan ekstrem mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, yakni Maret 2021. Suryana menyebut kondisi kemiskinan ekstrem di Jakarta mirip dengan di Bali.

"Kalau kemiskinan ekstremnya Jakarta meningkat dari 0,6 menjadi 0,89 persen. Tapi secara jumlah, kondisi kemiskinan Jakarta dalam posisi 'hard rock', dalam

arti memang kemiskinannya sudah di kerak-keraknya," ujar dia.

"Itu jadi sangat mudah naik, sangat sulit untuk turun, itu kondisi kemiskinan di daerah-daerah yang kemiskinannya sangat rendah. Sama, di DKI Jakarta, di Bali kondisinya mirip-mirip," sambung Suryana.

Sebaran Kemiskinan Ekstrem di DKI

Suryana kemudian menyampaikan penduduk miskin ekstrem paling banyak di wilayah Jakarta Utara (Jakut). Sementara wilayah terendah penduduk miskin ekstrem adalah Jakarta Barat (Jakbar).

Dia menerangkan kriteria penduduk miskin ekstrem adalah pengeluaran per kapitanya di bawah Rp 11.633 per hari.

"Intinya bahwa kalau BPS itu menghitung data makro, maka untuk menelusuri siapa dan di mananya membutuhkan data mikro. *By name by address* itu menggunakan data mikro yang sudah ada di Pemprov DKI Jakarta," jelasnya.

Suryana menjelaskan sejumlah karakteristik penduduk Jakarta mengalami kondisi kemiskinan ekstrem. Antara lain mayoritas Kepala Rumah Tangga lulusan SMA dengan rata-rata usia 45,5 tahun. "Kemudian ada juga yang lansia, balita. Kondisi perumahan ada yang belum layak, luas lahan per kapita di bawah 8 meter persegi," terangnya. ● yan

4 | Metropolis

FOTO/ANT



LIGA 2 BELUM BISA DILANJUTKAN

Menpora Zainudin Amali (tengah) bersama perwakilan klub Liga 2 dan jajaran pengurus Asosiasi Sepakbola Profesional Indonesia (APPI) usai audiensi terkait kelanjutan Liga 2 serta Liga 3 di Kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (30/1). Menpora menyebutkan bahwa kompetisi sepakbola kasta kedua di Tanah Air belum bisa berlanjut sampai Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI digelar.

KINI SEDANG DIURUS IZINNYA

BUMN dan Swasta Akan Bangun Rumah DP Rp0 di Jaktim

"Ada beberapa pihak swasta yang sudah mendapatkan perizinan melalui sidang BKPRD beberapa waktu yang lalu, tapi mereka masih dalam proses untuk menyelesaikan perizinannya," ucap Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Sarjoko.

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan, sudah ada pihak ketiga yang hendak membangun rumah dengan down payment (DP)

Rp0. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Sarjoko berujar, salah satu pihak ketiga yang hendak

membangun rumah DP Rp0 adalah PT Amarta Karya (Amka). Menurut dia, Amka selaku BUMN hendak membangun DP Rp 0 di Halim Sky Residence, Jakarta Timur. "Ada beberapa (BUMN) yang akan membangun rumah DP Rp 0) sebenarnya, termasuk salah satunya itu PT Marta Karya yang di Halim Sky Residence," ujar Sarjoko di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (30/1).

Kemudian, kata Sarjoko, ada juga pihak swasta yang hendak membangun hunian DP Rp0 setelah mendapatkan izin melalui sidang Badan

Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) DKI Jakarta. Kini, menurut dia, pihak swasta itu tengah menyelesaikan proses perizinan terkait pembangunan DP Rp 0. Pembangunan akan dimulai setelah proses perizinan rampung.

"Ada beberapa pihak swasta yang sudah mendapatkan perizinan melalui sidang BKPRD beberapa waktu yang lalu, tapi mereka masih dalam proses untuk menyelesaikan perizinannya," ucap Sarjoko.

Sarjoko menekankan, pembangunan rumah DP Rp 0 itu belum tentu terlaksana pada 2023. Pembangunan tersebut bisa jadi terlaksana tahun depan. DPRKP DKI, kata Sarjoko, akan membahas waktu pembangunan dengan pihak ketiga tersebut.

"Nanti, kalau masalah eksekusi pembangunannya apakah tahun ini atau tahun besok, kami komunikasikan lebih lanjut dengan para pemegang izin tersebut," kata dia.

Sebagai informasi, DPRKP DKI Jakarta memang tak menganggarkan pembangunan hunian DP Rp 0 dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

Kemudian, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya selaku BUMD DKI juga tak mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) untuk membangun rumah DP Rp0 dalam APBD 2023. Sarana Jaya dituntut berwenang untuk membangun DP Rp 0. ● yan

TERDAMPAK PEMBANGUNAN OUTLET SODETAN CILIWUNG

24 KK Direlokasi ke Rusunawa Cipinang

JAKARTA (IM) - Warga yang terdampak pembangunan jalur keluarnya air (outlet) sodetan Kali Ciliwung di Kebon Nanas, Jakarta Timur, direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Sarjoko berujar, ada 24 kepala keluarga (KK) ber-KTP DKI Jakarta yang direlokasi. Menurut dia, ke-24 KK itu direlokasi ke Rusunawa Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur.

"Ada 24 KK. Iya, warga Jakarta," ucap Sarjoko di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (30/1). (Direlokasi ke) Rusunawa Cipinang Besar Utara," imbuh dia.

Ia mengungkapkan, para warga yang terdampak pembangunan outlet itu masih belum membayar tarif sewa rusunawa tersebut. Sebab, kini Peraturan Gubernur (Pergub)

Nomor 61 Tahun 2020 Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional Covid-19 masih berlaku.

"Harga sewanya belum ditentukan, saat ini masih gratis dengan Pergub Nomor 61 Tahun 2020," kata Sarjoko. Sarjoko melanjutkan, keluarga terdampak pembangunan outlet yang tidak ber-KTP DKI Jakarta dikembalikan ke daerah asal. Dalam kesempatan itu, ia tidak mengungkapkan ada berapa KK yang dikembalikan ke daerah masing-masing. "Saya dapat informasi dari wilayah, mereka (warga tak ber-KTP DKI) dikembalikan ke daerah (masing-masing)," ucap Sarjoko.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono sebelumnya memastikan bahwa warga yang terdampak

outlet sudah direlokasi ke rusun.

Relokasi dilakukan karena lahan tempat warga tinggal sudah dibebaskan Pemprov DKI Jakarta.

Saat ditanya apakah warga dibebaskan dari biaya sewa rusun, Heru menampiknya. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta hanya bertanggung jawab merelokasi.

Adapun soal biaya rusun dikembalikan ke aturan rusun masing-masing.

"Mereka hanya dikasih rumah susun, tentu rumah susun ada aturan," ujar Heru, 26 Januari 2023 lalu.

Usai seluruh lahan proyek dibebaskan, proyek pembuatan outlet kembali dilanjutkan.

"Untuk lahan semua selesai, fisik juga sekarang sedang menyelesaikan penyambungan, terus penutupan untuk posisi kontrolnya, penyempurnaan, kira-kira begitu," papar Heru. ● yan

Pemkot Depok Ancam Putus Kontrak Proyek Jembatan Jatijajar Jika Molor Lagi

DEPOK (IM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengatakan pihaknya akan memutus kontrak proyek Jembatan Jatijajar jika perbaikan kembali molor. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok menjelaskan tenggat proyek perbaikan jembatan Jatijajar hingga 14 Februari 2023.

"Kalau adendum kontraknya (dengan kontraktor) sampai 14 Februari, insya Allah selesai. Kalau tidak selesai, putus kontrak," kata Kepala Dinas PUPR Depok, Citra Indah Yulianty, Senin (30/1).

Citra lalu menuturkan satu-satunya proyek Pemkot Depok yang belum rampung hingga kini hanya perbaikan Jembatan Jatijajar. Dia yakin proyek perbaikan jembatan itu tidak molor lagi dan rampung 14 Februari.

"Yang belum selesai proyek Jembatan Jatijajar saja," ujar Citra.

Pada kesempatan terpisah, Bolang (45), warga setempat mengaku kesal atas proyek perbaikan jembatan yang molor lantaran menutup akses jalan.

"Kalau warga mah udah geram. Ya perjanjian kemarin tanggal 1 (Februari) besok udah harus dibuka untuk motor dan mobil juga. Tapi ya kalau masih kayak gini, mobil nggak bisa lewat jugalah, sudah pasti macet total," kata Bolang saat ditemui di Proyek Jembatan Jatijajar, Depok, Senin.

"Kalau warga mah udah geram. Ya perjanjian kemarin tanggal 1 (Februari) besok udah harus dibuka untuk motor dan mobil juga. Tapi ya kalau masih kayak gini, mobil nggak bisa lewat jugalah, sudah pasti macet total," kata Bolang saat ditemui di Proyek Jembatan Jatijajar, Depok, Senin.

"Yang belum selesai proyek Jembatan Jatijajar saja," ujar Citra.

Pada kesempatan terpisah, Bolang (45), warga setempat mengaku kesal atas proyek perbaikan jembatan yang molor lantaran menutup akses jalan.

"Kalau warga mah udah geram. Ya perjanjian kemarin tanggal 1 (Februari) besok udah harus dibuka untuk motor dan mobil juga. Tapi ya kalau masih kayak gini, mobil nggak bisa lewat jugalah, sudah pasti macet total," kata Bolang saat ditemui di Proyek Jembatan Jatijajar, Depok, Senin (30/1). ● yan



LEO/DANIEL JUARA GANDA PUTRA INDONESIA MASTERS 2023
Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Daniel Marthin (kanan) dan rekannya Leo Rolly Carnando (kiri) mengembalikan kok ke arah lawannya pebulu tangkis ganda putra RRT He Ji Ting dan Zhou Hao Dong pada final turnamen Daihatsu Indonesia Masters 2023 di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (29/1). Leo Rolly Carnando dan Daniel Marthin menjadi juara ganda putra Daihatsu Indonesia Masters 2023 usai mengalahkan pebulu tangkis ganda putra RRT He Ji Ting dan Zhou Hao Dong dengan skor 21-17 dan 21-16.

PENGUMUMAN
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham, dengan ini dimungkinkan bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT SAS GRAMARINDO KHATULISTIWA ("Perseroan"), tertanggal 27 Januari 2023 Nomor 67, dibuat di hadapan STEPHANIE WILAMARTA, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan saham dalam simpanan (portofolio) Perseroan dengan cara mengkonversi utang Perseroan kepada pemegang sahamnya, yaitu KARIN MONICA, dengan jumlah sebesar Rp 4.881.000.000,- (empat miliar delapan ratus delapan puluh satu juta Rupiah) dan ERIKOCK KODA, dengan jumlah sebesar Rp 4.737.000.000,- (empat miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah).
Jakarta, 31 Januari 2023.
PT SAS GRAMARINDO KHATULISTIWA
Direksi